

Keadilan Sosial di Era Global: Memastikan Kemakmuran Tidak Hanya Milik Elit

Pendahuluan

Globalisasi sering digambarkan sebagai pintu menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perdagangan bebas, kemajuan teknologi, dan arus investasi internasional diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, realitas yang saya amati menunjukkan bahwa manfaat globalisasi tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil justru berjalan beriringan dengan kesenjangan sosial yang masih tinggi. Kelompok elit ekonomi dan pemilik modal cenderung menikmati hasil terbesar dari globalisasi, sementara masyarakat kelas bawah masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam konteks ini, nasionalisme tidak cukup dimaknai sebagai simbol atau retorika kebangsaan semata. Nasionalisme seharusnya tercermin dalam keberpihakan negara terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Menurut hemat saya, tantangan terbesar nasionalisme di era global bukan hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga memastikan bahwa kemakmuran nasional tidak dimonopoli oleh segelintir kelompok. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila menjadi landasan penting untuk menjawab tantangan tersebut.

Globalisasi dan Ketimpangan Sosial di Indonesia

Salah satu dampak nyata globalisasi adalah meningkatnya ketergantungan ekonomi pada pasar global dan platform teknologi asing. Perusahaan besar dengan modal kuat lebih mampu beradaptasi dan bersaing dalam sistem ekonomi global, sementara usaha kecil dan menengah sering kali tertinggal. Saya melihat banyak pelaku UMKM yang kesulitan bersaing karena keterbatasan akses teknologi, modal, dan pasar, meskipun mereka berperan besar dalam menyerap tenaga kerja.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga memunculkan bentuk ketimpangan baru. Platform digital membuka peluang besar, tetapi keuntungan utamanya sering kali mengalir ke perusahaan besar dan investor, bukan kepada pekerja atau mitra kecil di dalam sistem tersebut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa globalisasi tanpa regulasi yang adil justru berpotensi memperlebar jurang sosial.

Ketimpangan ini, menurut saya, dapat mengancam nasionalisme. Ketika sebagian masyarakat merasa tertinggal dan tidak merasakan manfaat pembangunan, rasa

kepercayaan terhadap negara dapat melemah. Nasionalisme tidak akan tumbuh di tengah ketidakadilan, karena cinta terhadap bangsa membutuhkan rasa memiliki dan keadilan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila dan Nasionalisme Berbasis Keadilan Sosial

Pancasila, khususnya sila kelima, menegaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam era global, nilai ini seharusnya menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial. Menurut saya, nasionalisme yang sejati adalah nasionalisme yang berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pada pertumbuhan angka-angka ekonomi.

Nilai keadilan sosial menuntut negara untuk hadir dalam mengoreksi ketimpangan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar global. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan redistribusi, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi rakyat. Tanpa upaya tersebut, globalisasi hanya akan memperkaya elit dan meninggalkan sebagian besar masyarakat dalam kondisi rentan.

Lebih jauh, Pancasila juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dalam konteks globalisasi, sikap ini penting agar Indonesia tidak terjebak dalam logika pasar bebas yang mengabaikan aspek kemanusiaan. Saya berargumen bahwa nasionalisme berbasis Pancasila harus mampu mengarahkan globalisasi agar sejalan dengan tujuan keadilan sosial.

Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial di Era Global

Menurut saya, terdapat beberapa langkah nyata yang dapat dilakukan untuk memastikan keadilan sosial tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang melindungi kelompok rentan, seperti pekerja informal dan UMKM, agar tidak tersisih oleh persaingan global.

Akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan teknologi juga harus diperluas agar masyarakat memiliki daya saing yang setara.

Dalam jangka menengah, pembangunan ekonomi harus diarahkan pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan. Investasi asing seharusnya tidak hanya dilihat dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah perlu memastikan adanya alih teknologi, penciptaan lapangan kerja layak, dan perlindungan lingkungan.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penanaman nilai keadilan sosial perlu dimulai dari pendidikan. Generasi muda harus dibekali kesadaran kritis bahwa nasionalisme tidak berhenti pada simbol, tetapi diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama. Bagi saya pribadi, mendukung produk lokal, bersikap kritis terhadap ketimpangan, dan aktif dalam kegiatan sosial merupakan bentuk nasionalisme yang relevan di era global.

Kesimpulan

Globalisasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diarahkan sesuai dengan nilai dan tujuan bangsa. Tantangan utama nasionalisme di era global adalah memastikan bahwa kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh elit, melainkan dirasakan oleh seluruh rakyat. Menurut saya, Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial, memberikan arah yang jelas bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut. Nasionalisme yang dinamis adalah nasionalisme yang mampu beradaptasi dengan dunia global tanpa mengorbankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan menjadikan keadilan sosial sebagai inti nasionalisme, Indonesia dapat tetap berdiri tegak di tengah arus global yang terus berubah.

Daftar Pustaka

Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan. (2014). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Stiglitz, Joseph E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton & Company.

Pernyataan Anti-Plagiarisme

Saya menyatakan bahwa tulisan ini adalah hasil karya pemikiran saya sendiri dan tidak merupakan hasil plagiasi atau penggunaan teknologi generatif AI secara penuh tanpa proses olah pikir mandiri.